

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara Indonesia yang dijamin dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (1), sehingga pemerintah berkewajiban menyediakan akses dan mutu pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah program Wajib Belajar 12 Tahun sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjamin kesempatan anak untuk mengikuti pendidikan formal. Program ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas serta mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045. Namun, ketercapaian visi Indonesia Emas 2045 melalui program Wajib Belajar 12 Tahun masih menghadapi tantangan dalam pemerataan dan keberlanjutan pendidikan, khususnya terkait persoalan putus sekolah.

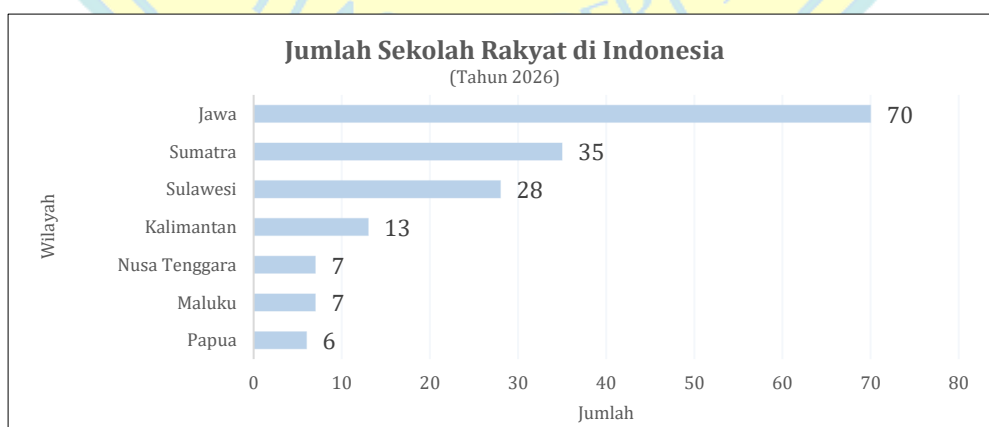
Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sekitar 4,2 juta anak usia 6–18 tahun tidak mengakses pendidikan formal, dengan mayoritas berasal dari keluarga miskin. Dari jumlah tersebut, sekitar 0,5 juta anak sama sekali tidak pernah bersekolah, 0,5 juta anak harus berhenti sekolah di tengah jenjang, dan 3,2 juta anak memilih tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, sehingga total anak putus sekolah mencapai 3,7 juta jiwa. Tingkat putus sekolah tertinggi terjadi pada jenjang SMA/SMK sebesar 0,86%, diikuti SMP/ sederajat 0,54%, dan SD/ sederajat 0,09% (BPS, 2025a).

Tingginya angka putus sekolah menunjukkan adanya berbagai faktor yang memengaruhi keberlanjutan pendidikan anak di Indonesia, salah satunya kondisi ekonomi keluarga. Adi Masykuri et al. (2025) menjelaskan bahwa anak dari keluarga kurang mampu lebih berisiko mengalami putus sekolah akibat keterbatasan biaya pendidikan, seperti biaya sekolah, seragam, buku, dan transportasi, serta tuntutan untuk membantu perekonomian keluarga. Sejalan dengan pernyataan tersebut, World Bank (2025) menegaskan bahwa partisipasi pendidikan menengah anak dari keluarga miskin lebih rendah dibandingkan

anak dari keluarga sejahtera, sehingga lebih rentan mengalami putus sekolah pada jenjang SMP dan SMA. Pernyataan ini diperkuat oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 23,85 juta orang (8,47% dari total populasi), dengan tingkat kemiskinan perkotaan sebesar 6,73%. (BPS, 2025b). Kondisi kemiskinan ini dapat membatasi akses terhadap pendidikan, memperlebar kesenjangan sosial, serta mengurangi peluang anak dari keluarga miskin untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan.

Untuk mengatasi persoalan putus sekolah dan keterbatasan akses pendidikan pada kelompok masyarakat marginal, pemerintah mendirikan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari implementasi kebijakan nasional. Kebijakan ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem serta Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 yang menekankan pentingnya penyediaan layanan pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi masyarakat rentan. Melalui kebijakan tersebut, Sekolah Rakyat tidak hanya berfungsi sebagai penyedia akses pendidikan, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Sekolah Rakyat dirancang sebagai satuan pendidikan berasrama untuk mendukung proses pendidikan dan pembinaan secara terpadu, serta mengurangi hambatan belajar yang bersumber dari lingkungan keluarga yang kurang kondusif bagi tumbuh kembang anak (Fauzi, 2025).



Gambar 1.1 Diagram Batang Jumlah Sekolah Rakyat di Indonesia (Tahun 2026)

Sumber: Hasil pengolahan data peneliti, tahun 2026

Sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1, data jumlah Sekolah Rakyat di Indonesia per 12 Januari 2026 tercatat sebanyak 166 unit dengan total 15.954 peserta didik dan 2.218 guru. Distribusi sekolah tersebut paling banyak berada di Pulau Jawa dengan jumlah 70 sekolah, diikuti Sumatra sebanyak 35 sekolah dan Sulawesi sebanyak 28 sekolah. Di Kalimantan terdapat 13 sekolah yang telah beroperasi. Sementara itu, kawasan timur Indonesia relatif lebih sedikit, yakni Nusa Tenggara sebanyak 7 sekolah, Maluku sebanyak 7 sekolah, serta Papua sebanyak 6 sekolah (Setkab, 2026).

Di tingkat daerah, Provinsi DKI Jakarta telah memulai program Sekolah Rakyat melalui tiga sekolah rintisan jenjang SMP dan SMA sebagai percontohan. Program ini menjadi langkah awal dalam memperluas akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di wilayah perkotaan. Sejalan dengan tujuan tersebut, pemerintah memberikan dukungan yang komprehensif melalui penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran, meliputi ruang kelas modern, papan pintar (*smartboard*), laboratorium, perpustakaan, ruang makan, ruang kesehatan, dan ruang konseling (Amini, 2025; Darojatun, 2025). Semua kebutuhan siswa, termasuk seragam, alat belajar dan pemenuhan gizi melalui makan tiga kali sehari diberikan secara gratis (Purwowidhu, 2025). Pemanfaatan teknologi juga menjadi bagian integral dalam proses belajar, sehingga Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada perluasan akses, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan pendidikan (Ameliya, 2025).

Guna mendukung penyelenggaraan pembelajaran di Sekolah Rakyat, diterapkan Kurikulum Nasional Plus yang bersifat fleksibel dan *tailor-made*, yakni dirancang khusus sesuai latar belakang, kebutuhan, dan kemampuan peserta didik agar pembelajaran relevan dan bermakna. Selain itu, pendekatan pembelajaran *deep learning* juga diterapkan untuk memastikan pemahaman mendalam (Swasty, 2025). Keunikan kurikulum ini tampak pada sistem *Multi Entry Multi Exit* (MEME) yang memberikan fleksibilitas bagi murid untuk memulai dan menyelesaikan studi sesuai dengan kemampuan mereka (Kemendikdasmen, 2025).

Dalam pelaksanaannya, guru berperan sentral bukan hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing. Interaksi guru dan peserta didik berlangsung tidak terbatas di kelas, melainkan mencakup pembinaan di luar jam pelajaran (Muharam & Kurniawan, 2025). Dengan demikian, guru dituntut mampu menerapkan pembelajaran yang terintegrasi antara kegiatan akademik dan pembinaan secara berkelanjutan.

Kompleksitas peran tersebut menuntut guru memiliki kompetensi yang memadai agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Secara ideal (*das sollen*), guru Sekolah Rakyat diharapkan mampu menerapkan pembelajaran secara efektif sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Pembelajaran yang efektif tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan sarana prasarana, pemanfaatan teknologi, dan kurikulum yang inovatif, tetapi juga ditentukan oleh kompetensi guru sebagai faktor internal dalam proses pembelajaran. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa efektivitas pembelajaran dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti sarana prasarana dan inovasi kurikulum. Latifah et al. (2025) menunjukkan bahwa efektivitas pembelajaran sangat bergantung pada ketersediaan fasilitas pendukung serta pemanfaatan teknologi pembelajaran yang inovatif. Selanjutnya, Salimodo et al. (2023) menekankan bahwa inovasi dalam manajemen kurikulum melalui integrasi teknologi mampu meningkatkan efektivitas proses belajar. Sementara itu, ditinjau dari faktor internal, Yanti et al. (2025) menegaskan bahwa efektivitas pembelajaran pada akhirnya ditentukan oleh keterampilan dasar mengajar guru, sehingga kompetensi guru menjadi faktor utama dalam pencapaian tujuan pembelajaran.

Kompetensi yang dimaksud yaitu kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran di kelas, serta evaluasi pembelajaran yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Muhadi et al. (2025) menegaskan bahwa ketiga aspek ini saling berkaitan dalam mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan relevan. Sehingga perencanaan yang matang, pelaksanaan yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, serta evaluasi yang tepat menjadi satu kesatuan yang saling berkaitan dalam mewujudkan proses pembelajaran yang efektif.

Pada praktiknya (*das sein*), guru di Sekolah Rakyat yang ada di DKI Jakarta masih dihadapkan pada berbagai tantangan dalam proses pembelajaran. Penelitian Muharam & Kurniawan (2025) menunjukkan bahwa guru di Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan harus menjalankan fungsi pengajaran sekaligus pembinaan, tetapi tidak diimbangi dengan dukungan pengembangan kompetensi yang memadai. Akibatnya, motivasi mengajar guru cenderung menurun dan risiko *burnout* meningkat, sehingga membatasi kemampuan guru dalam mengoptimalkan proses pembelajaran secara menyeluruh.

Berbagai tantangan dalam proses pembelajaran juga tergambar dari hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di tiga Sekolah Rakyat Provinsi DKI Jakarta, yaitu Sekolah Rakyat Menengah Atas 9, Sekolah Rakyat Menengah Atas 10, dan Sekolah Rakyat Menengah Pertama 6 Jakarta. Berdasarkan observasi tersebut, diperoleh gambaran mengenai dinamika pembinaan peserta didik, implementasi pembelajaran, serta proses rekrutmen guru. Secara umum, proses penyelenggaraan pembelajaran dan pembinaan peserta didik masih berada pada fase adaptasi terhadap implementasi Sekolah Rakyat. Meskipun mayoritas guru berlatar belakang jurusan kependidikan dan memahami perkembangan anak, guru masih berada dalam proses penyesuaian terhadap tata kelola Kurikulum Nasional Plus Sekolah Rakyat serta karakteristik peserta didik yang memerlukan pendekatan berbeda dari sekolah reguler. Oleh karena itu, fase transisi ini membutuhkan waktu dan perumusan strategi khusus agar pembinaan akademik maupun nonakademik dapat mencapai hasil yang optimal.

Di samping aspek pembelajaran, hasil observasi juga menunjukkan bahwa proses rekrutmen guru Sekolah Rakyat memiliki tahapan yang lebih kompleks dibandingkan dengan sekolah reguler pada umumnya. Rekrutmen dilakukan langsung oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Calon guru diwajibkan memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai syarat utama, kemudian mengikuti seleksi

administrasi, tes kompetensi, serta proses penempatan sesuai kebutuhan sekolah berasrama.

Berbeda dengan sekolah reguler yang lebih menekankan kompetensi akademik dan pedagogik, rekrutmen guru Sekolah Rakyat juga menuntut kesiapan untuk bertugas di lingkungan asrama. Dengan demikian, guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendamping yang memberikan pembinaan karakter serta dukungan psikososial bagi peserta didik dari kelompok rentan. Meskipun dalam persyaratan formal aspek pembinaan tidak dicantumkan secara eksplisit, karakteristik sekolah berasrama menjadikan peran tersebut sebagai konsekuensi yang tidak terpisahkan dari tugas guru.

Merujuk pada uraian sebelumnya, pembelajaran di Sekolah Rakyat DKI Jakarta menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal (*das sollen*) dan kenyataan (*das sein*). Secara ideal, guru diharapkan mampu menerapkan pembelajaran yang efektif sesuai karakteristik peserta didik serta tuntutan Kurikulum Nasional Plus, akan tetapi dalam praktiknya, guru masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perlunya penguatan kompetensi pedagogik berkelanjutan, proses adaptasi terhadap karakteristik peserta didik yang berbeda dengan sekolah reguler, penyelarasan kapasitas teknologi di masa awal, serta beban kerja yang lebih tinggi. Kesenjangan ini berpotensi memengaruhi kualitas pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus efektivitas pembelajaran di sekolah reguler, khususnya terkait kompetensi pedagogik guru. Penelitian yang dilakukan oleh Gunawan et al. (2025) menyoroti manajemen mutu kelas, dan hasilnya menunjukkan bahwa efektivitas pembelajaran peserta didik meningkat ketika mutu kelas dikelola secara terorganisir melalui aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Penelitian tersebut berfokus pada pengelolaan kelas secara umum dan belum secara spesifik mengkaji efektivitas pembelajaran pada sekolah alternatif dengan karakteristik peserta didik yang lebih beragam.

Penelitian lain oleh Cahyana & Agustin (2024) di lima sekolah dasar Kabupaten Garut memperlihatkan bahwa kompetensi pedagogik guru kelas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran berada pada kategori tinggi, dengan perencanaan mencapai 83,3% (sangat tinggi), pelaksanaan 66,7% (tinggi), dan evaluasi 75% (tinggi). Penelitian tersebut lebih berfokus pada deskripsi kompetensi pedagogik guru, sementara analisis mengenai efektivitas pembelajaran sebagai hasil dari proses pembelajaran belum menjadi fokus utama penelitian. Sementara itu, Penelitian Halim et al. (2025) di SMP Terpadu Al-Ikhlas Maluku menemukan bahwa efektivitas kinerja guru dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran berada pada kategori baik, sehingga mendukung tercapainya efektivitas pembelajaran. Penelitian tersebut lebih berfokus pada evaluasi kinerja guru, sedangkan efektivitas pembelajaran sebagai hasil dan ketercapaian proses pembelajaran belum menjadi fokus utama kajian tersebut.

Hingga saat ini, kajian mengenai efektivitas pembelajaran di Sekolah Rakyat masih relatif terbatas karena program ini tergolong baru dalam sistem pendidikan nasional, sehingga data empiris mengenai praktik pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran masih dalam tahap pengembangan dalam kajian akademik. Oleh karena itu, kualitas proses pembelajaran di Sekolah Rakyat belum sepenuhnya tergambarkan secara komprehensif. Penilaian terhadap sejauh mana praktik mengajar guru telah berjalan efektif sesuai dengan tuntutan kurikulum dan karakteristik peserta didik pun masih perlu dikaji lebih lanjut.

Dari sisi urgensi sosial, penelitian ini penting karena keberhasilan Sekolah Rakyat sebagai program pemerintah tidak hanya ditentukan oleh akses pendidikan, tetapi juga oleh kualitas pembelajaran. Dari sisi kebijakan, penelitian ini diperlukan untuk memperkuat data empiris sebagai dasar pengembangan kebijakan, melengkapi evaluasi yang telah dilakukan oleh Kementerian Sosial. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi hasil evaluasi tersebut dengan menyediakan data empiris mengenai efektivitas pembelajaran serta faktor pendukung dan faktor penghambat pembelajaran di Sekolah Rakyat Provinsi DKI Jakarta tahun ajaran 2025/2026 sebagai bahan

pertimbangan dalam pengembangan pendidikan alternatif. Oleh karenanya, peneliti tertarik untuk menelaah efektivitas pembelajaran di Sekolah Rakyat Provinsi DKI Jakarta, yang dilakukan pada tahun ajaran 2025/2026 sebagai dasar perumusan kebijakan dalam penguatan kompetensi guru dan peningkatan mutu pembelajaran, serta berkontribusi pada pengembangan praktik pembelajaran yang inklusif.

B. Pembatasan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, batasan masalah dalam penelitian ini adalah “Efektivitas Pembelajaran di Sekolah Rakyat Provinsi DKI Jakarta”. Penelitian ini difokuskan pada efektivitas pembelajaran yang ditinjau dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Penelitian ini juga dibatasi pada pengkajian faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas pembelajaran di Sekolah Rakyat Provinsi DKI Jakarta.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas pembelajaran di Sekolah Rakyat Provinsi DKI Jakarta?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat efektivitas pembelajaran di Sekolah Rakyat Provinsi DKI Jakarta?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya untuk memperkaya literatur mengenai efektivitas pembelajaran di Sekolah Rakyat Provinsi DKI Jakarta.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Guru

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas pembelajaran, sehingga guru dapat meningkatkan strategi, metode, serta kualitas pembelajaran.

b. Bagi Sekolah

Penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi Sekolah Rakyat untuk memberikan dukungan berupa arahan, pelatihan, dan fasilitas yang relevan bagi guru dalam menerapkan pembelajaran secara efektif.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan pendidikan alternatif yang lebih efektif, termasuk penyediaan program pelatihan, pendampingan, dan penguatan kurikulum bagi guru di Sekolah Rakyat.

d. Bagi Peneliti dan Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk studi lanjutan atau penelitian komparatif, serta memberikan wawasan bagi pembaca terkait praktik pembelajaran yang efektif dalam pendidikan alternatif.